



Prodi Ekonomi
Syariah

Ekobis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah

Journal homepage: <http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/ekobis>

Volume 3, No. 1
Januari-Juni 2019
Halaman: 55-67

Pengelompokkan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Berdasarkan Kasus Kekerasan, Tingkat Pengangguran, dan Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2010-2015

Cut Dian Fitri, Winny Dian Safitri, Ovasani Lianda

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Submit 4 April 2019

Revisi 3 Mei 2019

Diterima 2 Juni 2019

Kata Kunci:

Indeks Pembangunan manusia,
Persentase Pengangguran,
Kasus Kekerasan,
Non-hierarchical clustering dan cluster

ABSTRACT

This study aims to determine the grouping of districts/cities and the distribution of the number of cases of violence, the unemployment rate and the human development index in 2010-2015. The data used are data on the number of cases of violence, the percentage of unemployment and the human development index of 23 districts/cities in Aceh Province in the 2010-2015 period. The analysis technique used is a non-hierarchical clustering analysis based on the size of the similarity and the smallest distance value. The results of the analysis using the non-hierarchical clustering method resulted in 5 clusters with the number of districts/cities being ranked 1,2,3,4 and 5. In general, districts/cities in Aceh Province in the 2010-2015 range had a level of community welfare that was in the middle level. The city of Sabang is considered successful in improving people's welfare because it managed to crawl forward from the lowest cluster rank to the highest cluster ranking. The district/city that ranks the lowest during the 2010-2015 period and is in the red zone is North Aceh District

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelompokkan kabupaten/kota dan pendistribusian jumlah kasus kekerasan, tingkat pengangguran dan indeks pembangunan manusia tahun 2010-2015. Data yang digunakan adalah data jumlah kasus kekerasan, persentase pengangguran dan indeks pembangunan manusia 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh dalam kurun waktu 2010-2015. Teknik analisis yang digunakan berupa analisis non-hierarchical clustering yang didasarkan pada ukuran kemiripan dan nilai jarak terkecil. Hasil analisis dengan metode non-hierarchical clustering menghasilkan 5 cluster dengan jumlah kabupaten/kota yang diperingkatkan menjadi peringkat 1,2,3,4 dan 5. Secara umum kabupaten/kota di Provinsi Aceh pada rentang tahun 2010-2015 memiliki tingkat kesejahteraan masyarakat yang berada dalam peringkat menengah. Kota Sabang dianggap sukses dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena berhasil merangkas maju dari peringkat cluster terendah hingga berada diperingkat cluster tertinggi. Kabupaten/kota yang menempati peringkat terendah selama kurun waktu 2010-2015 dan berada di zona merah adalah Kabupaten Aceh Utara

1. PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri sehingga membutuhkan orang lain untuk hidup bersama, secara alamiah tiap individu melakukan interaksi dengan kelompok dimana individu tersebut berada sehingga menimbulkan keteraturan dan ketertiban dalam kehidupan bersama. Interaksi anatar manusia dapat menciptakan berbagai kondisi seperti kenyamanan, saling menghormati dan peduli, namun interaksi sosial yang dilakukan manusia dapat menimbulkan permasalahan dalam bermasyarakat seperti kekerasan. Menurut Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan Indonesia (SNPK) menyatakan bahwa ada empat bentuk kekerasan yang terjadi dimasyarakat yaitu konflik, kekerasan dalam penegakan hukum, kriminalitas dan kekerasan dalam rumah tangga. tindakan kekerasan timbul disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi seperti permasalahan ekonomi, pergaulan dan sumber daya manusia yang kurang baik berkualitas dibutuhkan untuk

* Corresponding author: Cut Dian Fitri

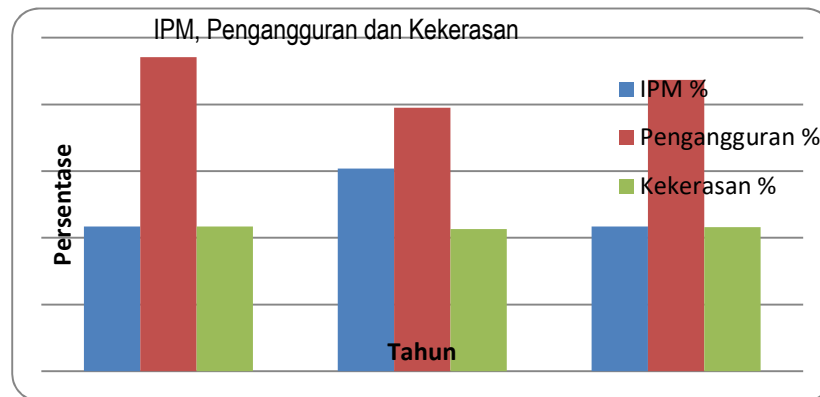
E-mail address: cutdianfitri@ar-raniry.ac.id

menyelesaikan masalah tersebut (Erlina, 2014).

Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi salahsatu indikator untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di masyarakat. SDM yang buruk disuatu daerah akan menyebabkan timbulnya permasalahan yang semakin tidak teratasi. Mengukur kualitas SDM dilakukan dengan membentuk suatu indeks yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) disuatu daerah. sebagai ukuran kualitas hidup, terdapat tiga indikator yang digunakan untuk mengukur IPM suatu negara yakni mencakup kesehatan, pendidikan dan kehidupan yang layak. Sektor pendidikan dapat mempengaruhi angka kesempatan kerja, indikator pengeluaran perkapita dapat merefleksikan kebutuhan hidup dan kesehatan (jasmani dan rohani) menjadi pondasi dalam kehidupan. Untuk meningkatkan IPM disuatu daerah peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk mewujudkannya (Nurmainah, 2013).

Permasalahan yang timbul akibat IPM yang rendah di suatu daerah adalah tingkat pengangguran yang tinggi dan munculnya tidakan kekerasan. Indonesia menjadi salah satu negara yang tingkat pengangguran dan jumlah tindakan kekerasan yang cukup tinggi. BPS (2018) pada tahun 2015 Provinsi aceh mendudukkan posisi tertinggi ke-17 se-Indonesia dalam jumlah kasus kekerasan yaitu sebesar 127 kasur. Selain penurunan IPM, peningkatan kasus kekerasan di masyarakat terjadi disebabkan oleh jumlah pengangguran yang terus meningkat.

Pengangguran merupakan keadaan yang disebabkan oleh tidak terdapat lapangan pekerjaan yang cukup untuk menampung SDM, kurangnya skill yang dimiliki oleh SDM dan tingkat pendidikan yang rendah sehingga menimbulkan jumlah pengangguran yang cukup tinggi seperti pada tahun 2015 jumlah pengangguran Indonesia adalah 6,18% dari total rata-rata pengangguran terbuka di Indonesia dan pada tahun 2015 daerah yang berada di posisi pertama dalam jumlah pengangguran terbanyak adalah Provinsi Aceh dengan 9,93% dari total jumlah pengangguran terbuka di Indonesia. Dampak dari peningkatan jumlah pengangguran bagi masyarakat di setiap daerah adalah jumlah tindakan kekerasan.



Gambar 1 IPM, Pengangguran dan Kekerasan di Aceh Tahun 2013-2015

Gambar 1 menunjukkan bahwa tahun 2014 menjadi tahun yang lebih unggul dibandingkan dengan tahun 2013 dan tahun 2015. Dimana pada tahun 2014 persentase IPM sebesar 6,08% yang lebih tinggi dari tahun lain, persentase kasus kekerasan yang rendah sebesar 4,26% dan persentase pengangguran sebesar 7,09%. Data diatas menunjukkan bahwa jumlah peningkatan IPM akan diikuti dengan penurunan tingkat pengangguran dan kekerasan. Namun penurunan IPM akan menaikkan tingkat pengangguran dan kekerasan di Provinsi Aceh.

Permasalahan-permasalahan yang timbul tersebut dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut kerjasama antara pemerintah dan kabupaten/kota diperlukan agar kesejahteraan di masyarakat dapat terwujud. Dalam hal ini perlu adanya kajian khusus untuk melihat pengelompokkan wilayah-wilayah kabupaten/kota di Provinsi Aceh berdasarkan tingkat pengangguran, jumlah kasus kekerasan dan indeks pembangunan manusia. Dimana tujuan penelitian dilakukan adalah untuk mengetahui daerah-daerah di Aceh yang memerlukan perhatian khusus pemerintah dalam mengatasi permasalahan pengangguran, kekerasan dan indeks pembangunan manusia.

2. TINJAUAN TEORITIS

Kekerasan

Menurut Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan Indonesia (SNPK) kekerasan adalah tindakan-tindakan baik antara individu maupun antar kelompok yang menyebabkan atau dapat menyebabkan dampak fisik terhadap manusia atau harta benda. Kekerasan dapat menimpa semua orang dan yang paling parah saat ini jumlah kekerasan paling tinggi terjadi kepada wanita dan anak-anak. Kekerasan seksual khususnya terhadap wanita bukanlah fenomena baru dan terjadi di seluruh dunia. Menurut UN Women, diperkirakan 35 persen perempuan di seluruh dunia telah mengalami kekerasan fisik maupun seksual di satu titik dalam

hidup mereka (Sabrina, 2018). Penyebab tindakan kekerasan yang terjadi di pengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kesenjangan dan kecemburuan sosial, Kekerasan bagian dari skala besar reformasi dan pembangunan bangsa, tindakan spontan emosional individu atau kelompok dan Akibat konflik agama. (hufad, 2003)

Islam tidak mengenal istilah kekerasan secara khusus, justru ajaran Islam secara tegas melarang terjadinya kekerasan. Hal ini dibuktikan dengan banyak ayat-ayat Al-qur'an maupun hadist terkait dengan larangan melakukan tindakan kekerasan. Sebagaimana firman Allah menyatakan:

أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

Artinya: "Bahwa barang siapa yang membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan- akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan- akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia". (Q.S. al-Maidah [5]:32).

Ayat Al-qur'an diatas menjelaskan bahwa Islam sangat melarang seseorang melakukan tindakan kekerasan kepada orang lain, bahkan sampai menghilangkan nyawa seseorang. Islam sangat melindungi dan menghargai sebuah kehidupan terutama nyawa seseorang.

Pengangguran

Pengangguran menjadi salah satu permasalahan utama ketenagakerjaan yang dihadapi negara berkembang, termasuk Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pengangguran adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan. Menurut Qardhawi (2005) pengangguran dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:

1. Pengangguran *jabariyah* yaitu suatu pengangguran dimana seseorang tidak mempunyai hak sedikitpun memilih status ini dan terpaksa menerimanya.
2. Pengangguran *khiyariyah* yaitu seseorang yang memilih untuk menganggur padahal adalah orang yang mampu untuk bekerja, namun pada kenyataannya memilih untuk berpangku tangan dan bermalas-malasan hingga menjadi beban bagi orang lain.

Islam telah memperingatkan agar manusia tidak ada yang menganggur karena pengangguran merupakan salah satu hal yang bisa menyebabkan kemiskinan, karena kemiskinan maka seseorang dapat melakukan sesuatu yang merugikan orang lain demi memenuhi kebutuhan pribadinya seperti dengan melakukan tindakan kekerasan. Pengangguran dapat memberikan dampak negative terhadap perekonomian secara keseluruhan, sehingga Islam mendorong umatnya berproduksi dan menekuni aktivitas ekonomi dalam segala bentuk baik dibidang pertanian, perdagangan, perindustrian dan lain-lain. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surah An-Naba ayat 11 yang berbunyi:

وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا

Artinya: "Dan Kami menjadikan siang untuk mencari penghidupan" (QS. An-Naba [78]:11).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan umat manusia untuk bekerja dimuka bumi untuk memenuhi segala kebutuhan diri sendiri dan keluarganya dengan memanfaatkan segala sumber daya alam yang telah disediakan oleh Allah SWT.

Indeks Pembangunan Manusia

Menurut BPS (2017) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator penting yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk) atau dengan kata lain, IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh, kesehatan, pendidikan, dan kehidupan yang layak. Indeks pembangunan manusia merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam tiga hal mendasar pembangunan manusia, yaitu: (Mirza, 2012)

1. lamanya hidup yang diukur dengan harapan hidup pada saat lahir;
2. tingkat pendidikan, yang diukur dengan kombinasi antara angka melek huruf pada penduduk dewasa (dengan bobot dua per tiga) dan rata-rata lama sekolah (dengan bobot sepertiga);
3. Tingkat kehidupan yang layak, diukur dengan pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan (PPP Rupiah).

Konsep ekonomi pembangunan syariah sangat bergantung pada kualitas SDM yang dimiliki oleh suatu bangsa, dimana Kualitas SDM sangat menentukan keberhasilan suatu negara. Dalam Islam manusia memiliki dua tugas utama, yaitu sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah dimuka bumi yang betugas untuk memakmurkannya. Keberhasilan manusia dalam menjalankan kedua tugas tersebut sangat bergantung pada jalan yang dipilih. Pilihan tersebut akan mempengaruhi potensi mana yang dapat

dioptimalkan sebagaimana disebutkan didalam Al-Qur'an Surah Asy-Syams ayat 8-10 yang berbunyi:

Artinya: "Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya (8) Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu (9) Dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya (10)". (QS. Asy-Syams [91]: 8-10).

Beik (2016) ayat diatas menjelaskan bahwa Allah telah memberikan manusia dengan dua potensi, yaitu potensi ketaqwaan dan potensi keburukan. Apabila manusia mengambil jalan *tazkiyyah*, maka manusia dapat mengoptimalkan kebaikan yang dimilikinya, dan sebaliknya apabila jalan *dassiyah* yang diambil maka yang mendominasi dirinya adalah keburukan. Kerangka jalan yang didasarkan *tazkiyyah* didasarkan atas tiga prinsip utama yaitu: keadilan, keseimbangan dan ketundukan penuh kepada Allah.

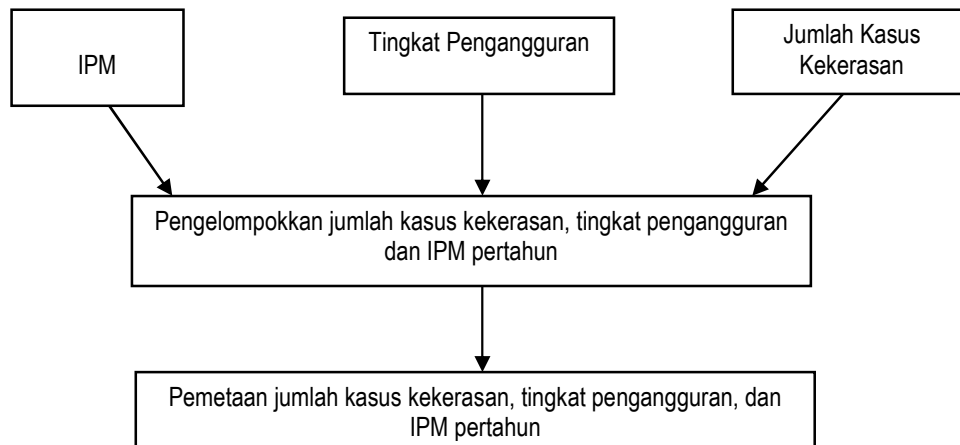
Penelitian Terkait

Nurcholis (2014) pada hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Timur. Dengan kata lain IPM yang meningkat di Provinsi Jawa Timur akan mengakibatkan tingkat pengangguran juga meningkat, sehingga pemerintah harus memikirkan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut sebab peningkatan IPM nyatanya tidak dapat menurunkan tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Timur.

Maisah (2016) hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dan hasil penelitian ini menyatakan bahwa yang menjadi penyebab kekerasan adalah masalah ekonomi, perbedaan pendapatan, dan selingkuh dari pasangan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa kekerasan dapat terjadi disebabkan beberapa faktor salah satunya ekonomi dan untuk mengurangi tindakan kekerasan di masyarakat maka tingkat kesejahteraan harus semakin ditingkatkan dalam masyarakat.

Chalid dan Yusuf (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa tingkat pengangguran berpengaruh negatif terhadap IPM di Provinsi Riau. Penelitian ini menyatakan bahwa tingkat pengangguran meningkat maka IPM Provinsi Riau akan menurun, sehingga penyelesaian masalah pengangguran merupakan faktor utama yang dilakukan pemerintah agar IPM dapat meningkat.

Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian & Jenis dan Sumber Data

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kuantitatif. Penelitian ini menganalisis interaksi data jumlah kasus kekerasan, persentase jumlah pengangguran dan indeks pembangunan manusia yang bertujuan untuk mengelompokkan n satuan pengamatan ke dalam k kelompok, sehingga unit-unit pengamatan dalam satu kelompok mempunyai ciri-ciri yang lebih homogen dibandingkan unit pengamatan dalam kelompok lain.

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data persentase jumlah pengangguran dan indeks pembangunan manusia yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan data jumlah kasus kekerasan yang diambil dari Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan Indonesia (SNPK). Adapun periode yang digunakan adalah tahunan dari tahun 2010 sampai tahun 2015. Sumber penelitian diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi yang diambil dari catatan, dokumentasi ataupun laporan-laporan dari BPS dan SNPK maupun sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Metode analisis data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis *cluster*. Analisis *cluster* adalah suatu metode dalam analisis peubah ganda yang bertujuan untuk mengelompokkan n satuan pengamatan ke dalam k kelompok, sehingga unit-unit pengamatan dalam satu kelompok mempunyai ciri-ciri yang lebih homogen dibandingkan unit pengamatan dalam kelompok lain. Dalam analisis *cluster* terdapat dua metode yang digunakan untuk mengelompokkan suatu objek yaitu:

1. Metode Hirarki

Dillon&Goldstein (1984) Metode *hirarki* adalah pendekatan dalam penggabungan objek-objek yang harus ditentukan terlebih dahulu jarak antar pengelompokan. Konsep jarak yang digunakan disini adalah jarak *Euclidean* dengan formulanya sebagai berikut:

$$d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \sqrt{\sum_{i=1}^p (x_i - y_i)^2}$$

Hal penting dalam metode *hirarki* adalah bahwa hasil pada tahap sebelumnya selalu bersarang di dalam hasil pada tahap berikutnya, membentuk sebuah pohon.

2. Metode non-hirarki

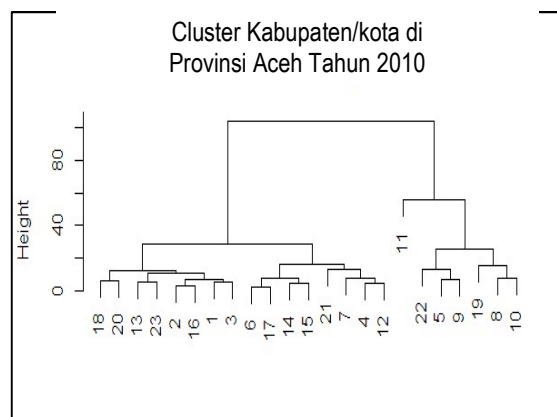
Metode *non-hirarki* dimulai dengan menentukan terlebih dahulu jumlah *cluster* yang diinginkan, sehingga sifat pengelompokannya tidaklah alamiah karena dikondisikan untuk jumlah kelompok tertentu.

Adapun dalam penelitian ini analisis *cluster* yang digunakan adalah dengan metode *non-hirarki* yaitu dengan menentukan jumlah *cluster* yaitu 5 *cluster*.

4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Pengelompokan, Pemeringkatan dan Visualisasi Kabupaten/kota di Provinsi Aceh Tahun 2010

Pengelompokan dengan metode *non-hirarki* bertujuan untuk melihat jarak antar objek pada 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh berdasarkan IPM, persentase pengangguran dan jumlah kasus kekerasan dimana apabila nilai jarak untuk setiap objek kecil maka akan dikelompokkan menjadi satu *cluster*. Adapun hasil output dari pengelompokan tersebut adalah sebagai berikut:



Sumber: diolah (2019)

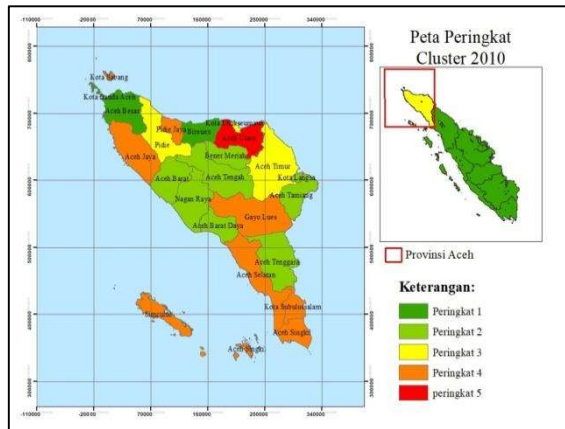
Adapun Hasil analisis *cluster* untuk data 23 kabupaten/kota berdasarkan IPM, persentase pengangguran dan jumlah kasus kekerasan pada tahun 2010 adalah sebagai berikut:

1. *Cluster* I yaitu Kabupaten Simeulue, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Pidie Jaya, Kota Sabang dan Kota Subussalam.
2. *Cluster* II yaitu Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Bener Meriah dan Kota Langsa.
3. *Cluster* III yaitu Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Pidie dan Kota Lhokseumawe.
4. *Cluster* IV yaitu Kabupaten Aceh Besar, Kota Banda Aceh dan Kabupaten Bireun.
5. *Cluster* V yaitu Kabupaten Aceh Utara.

Penentuan peringkat pada *cluster* kabupaten/kota dilakukan dengan menggunakan metode *voting*. Dari hasil *voting* didapati urutan peringkat yaitu:

- 1. Peringkat pertama adalah *cluster* IV,
- 2. Peringkat kedua adalah *cluster* II,
- 3. Peringkat ketiga adalah *cluster* III,
- 4. Peringkat keempat adalah *cluster* I,
- 5. Peringkat kelima adalah *cluster* V.

Kabupaten/kota di Provinsi Aceh dibagi menjadi 5 *cluster*, yang kemudian diperingkatkan. Dimana kabupaten/kota yang berada peringkat pertama merupakan daerah dengan persentase pengangguran, jumlah kasus kekerasan dan IPM yang memiliki nilai terendah, sedangkan peringkat kelima merupakan kelompok dengan nilai tertinggi dalam IPM, persentase pengangguran dan jumlah kasus kekerasan dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Aceh. Perbedaan dari tiap *cluster* divisualisasikan dengan peta kabupaten/kota Provinsi Aceh sebagai berikut:

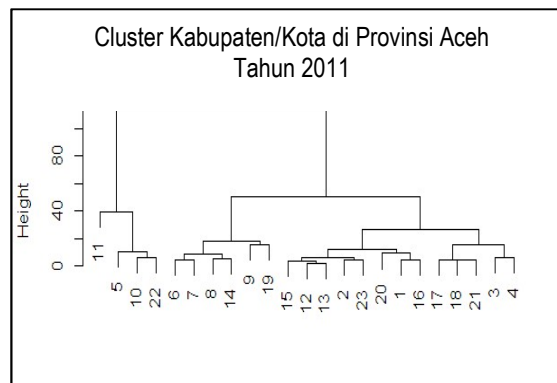


Sumber: diolah (2019)

Provinsi Aceh pada tahun 2010 dominan diduduki oleh kabupaten/kota yang berada di *cluster* II dengan peringkat kedua yang berwarna hijau tua dan *cluster* I diperingkat keempat yang berwarna orange merupakan daerah dengan jumlah kasus kekerasan, pengangguran dan IPM sedang. Adapun daerah yang berada di peringkat kedua dan peringkat keempat adalah Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh tamiang, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Bener Meriah, Kota Langsa, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Pidie dan Kota Lhokseumawe, sedangkan, daerah berwarna merah merupakan daerah yang berada pada *cluster* V dengan peringkat kelima yaitu daerah dengan persentase pengangguran serta jumlah kasus kekerasan yang tinggi disertai dengan IPM yang rendah menyebabkan Kabupaten Aceh Utara menjadi daerah dengan kondisi yang sangat mengkhawatirkan.

Pengelompokkan, Pemingkatan dan Visualisasi Kabupaten/kota di Provinsi Aceh Tahun 2011

Pengelompokkan dengan Metode *non-hirarki* digunakan untuk melihat jarak antar objek yaitu untuk mengetahui jarak antara 23 kabupaten/kota berdasarkan jumlah kasus kekerasan, persentase pengangguran dan IPM. Adapun hasil *output* yang di peroleh dari pengelompokkan adalah sebagai berikut:



Sumber: diolah (2019)

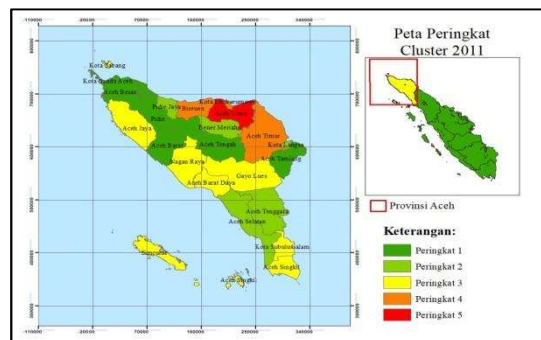
Hasil *cluster* untuk data 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh berdasarkan jumlah kasus kekerasan, IPM dan persentase pengangguran pada tahun 2011 yaitu:

1. *Cluster* I yaitu Kabupaten Simeulue, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Jaya, Kota Sabang dan Kota Subussalam.
2. *Cluster* II yaitu Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Pidie Jaya dan Kota Langsa.
3. *Cluster* III yaitu Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Bireun dan Kota Lhokseumawe.
4. *Cluster* IV yaitu Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, Kabupaten Aceh Tamiang dan Kota Banda Aceh.
5. *Cluster* V yaitu Kabupaten Aceh Utara.

Penentuan peringkat pada *cluster* kabupaten/kota dilakukan dengan menggunakan metode *voting*. Dari hasil *voting* didapati urutan peringkat yaitu:

1. Peringkat pertama adalah *cluster* IV,
2. Peringkat kedua adalah *cluster* II,
3. Peringkat ketiga yaitu *cluster* I,
4. Peringkat keempat adalah *cluster* III
5. Peringkat keempat adalah *cluster* V.

Kabupaten/kota yang dikelompokkan dalam 5 *cluster* berdasarkan jumlah kasus kekerasan, persentase pengangguran dan IPM pada tahun 2011. Kelima *cluster* diperingkatkan berdasarkan empat nilai statistik sehingga menemunkan peringkat pertama sampai kelima. Perbedaan dari tiap *cluster* divisualisasikan dengan peta kabupaten/kota Provinsi Aceh sebagai berikut:



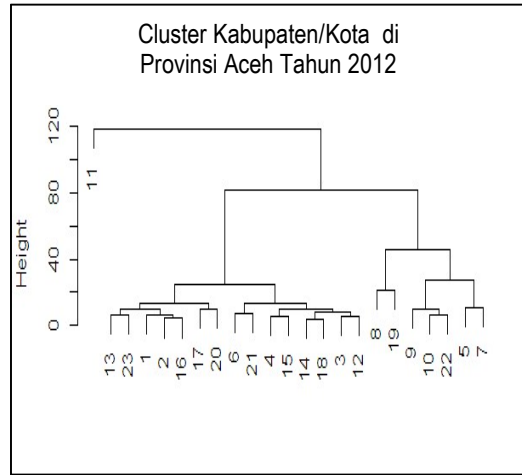
Sumber: diolah (2019)

Provinsi Aceh tahun 2011 berdasarkan jumlah kasus kekerasan, persentase pengangguran dan IPM dominan diduduki oleh kabupaten/kota yang berada di peringkat ketiga yang berwarna kuning. Kelompok yang berada di peringkat tiga adalah *cluster* I dengan kabupaten/kota yaitu Kabupaten Simeulue, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Jaya, Kota Sabang dan Kota Subussalam.

Kabupaten Aceh Utara masih menjadi daerah dengan peringkat terendah dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Aceh tahun 2011. Hal ini terjadi disebabkan oleh jumlah kasus kekerasan yang besar yaitu 115 kasus dan persentase pengangguran sebesar 8,68% yang lebih tinggi dari kabupaten/kota lain. Keadaan yang dihadapi oleh Kabupaten Aceh Utara saat ini menjadi faktor utama dari munculnya permasalahan tersebut. Penutupan pabrik-pabrik dan jumlah penduduk yang terus bertambah menyebabkan Kabupaten Aceh Utara kesulitan untuk keluar dari kondisi yang tersebut. Ketergantungan masyarakat pada pabrik-pabrik yang terdapat di Kabupaten Aceh Utara membuat masyarakat kesulitan menemukan jalan keluar dari permasalahan tersebut dan peran pemerintah sangat diperlukan untuk dapat mengembalikan kondisi Kabupaten Aceh Utara sehingga dapat kembali pada masa kejayaannya seperti beberapa tahun silam.

Pengelompokkan, Pemingkatan dan Visualisasi Kabupaten/kota di Provinsi Aceh Tahun 2012

Metode *non-hirarki* digunakan untuk melihat jarak antar objek yaitu untuk mengetahui jarak antara kabupaten/kota di Provinsi Aceh berdasarkan jumlah kasus kekerasan, IPM dan persentase pengangguran. Apabila hasil menunjukkan bahwa nilai jarak untuk setiap objek kecil maka akan dikelompokkan menjadi satu kelompok. Hasil pengelompokan objek yang dilakukan menunjukkan sebagai berikut:



Sumber: diolah (2019)

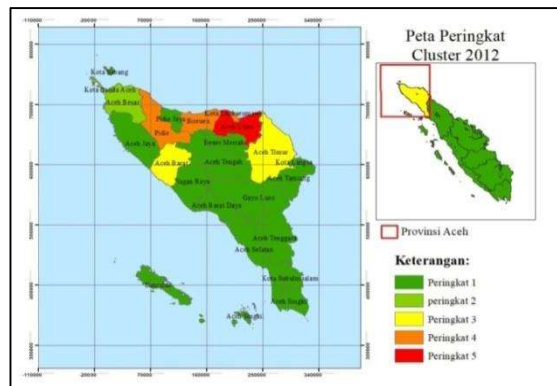
Hasil *cluster* untuk kabupaten/kota di Provinsi Aceh tahun 2012 berdasarkan jumlah kasus kekerasan, indeks pembangunan manusia dan persentase pengangguran yaitu:

1. *Cluster I* yaitu Kabupaten Simeulue, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Nagan raya, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Pidie Jaya, Kota Sabang, Kota Langsa dan Kota Subussalam.
2. *Cluster II* yaitu Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Barat.
3. *Cluster III* yaitu Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh.
4. *Cluster IV* yaitu Kabupaten Pidie, Kabupaten Bireun dan Kota Lhokseumawe.
5. *Cluster V* yaitu Kabupaten Aceh Utara.

Metode *voting* digunakan untuk mengetahui peringkat *cluster* kabupaten/kota di Provinsi Aceh tahun 2012. Adapun hasil dari *voting* yang dilakukan didapatkan adalah:

1. Peringkat pertama adalah *cluster I*,
2. Peringkat kedua adalah *cluster III*,
3. Peringkat ketiga adalah *cluster II*,
4. Peringkat keempat adalah *cluster IV*,
5. Peringkat kelima adalah *cluster V*.

Peringkat pertama pada tahun 2012 diduduki oleh kabupaten/kota pada *cluster I* yaitu Kabupaten Simeulue, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten pidie Jaya, Kota Sabang dan Kota Subussalam. Perbedaan dari tiap cluster divisualisasikan dengan peta kabupaten/kota Provinsi Aceh sebagai berikut:

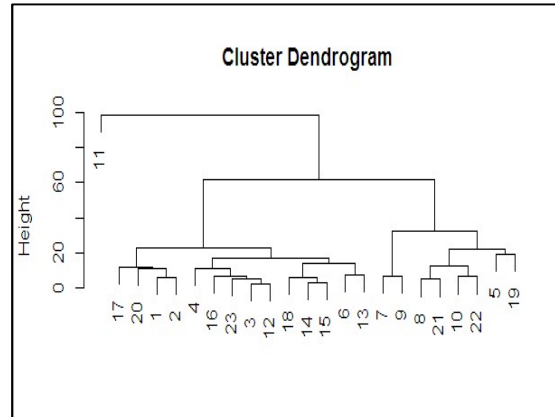


Sumber: diolah (2019)

Hasil diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2012 Provinsi Aceh di dominasi oleh *cluster* I yang menempati peringkat pertama berwarna hijau tua. *Cluster* I yang terdiri dari 15 kabupaten/kota menunjukkan bahwa dalam satu tahun banyak daerah yang telah mengalami perubahan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Perubahan jumlah kasus kekerasan dan pengangguran pada *cluster* I didukung dengan IPM yang meningkat di setiap kabupaten/kota hal ini terbukti dengan mulai meningkatnya taraf kehidupan masyarakat yang berada di daerah tersebut, sedangkan *cluster* yang menempati peringkat kelima pada tahun 2012 adalah *cluster* V dan Kabupaten Aceh Utara masih menjadi daerah dengan jumlah kasus kekerasan dan pengangguran tertinggi.

Pengelompokkan, Pemeringkatan dan Visualisasi Kabupaten/kota di Provinsi Aceh Tahun 2013

Pengelompokkan kabupaten/kota di Provinsi Aceh pada tahun 2013 berdasarkan jumlah kasus kekerasan, IPM dan persentase pengangguran adalah sebagai berikut:



Sumber: diolah (2019)

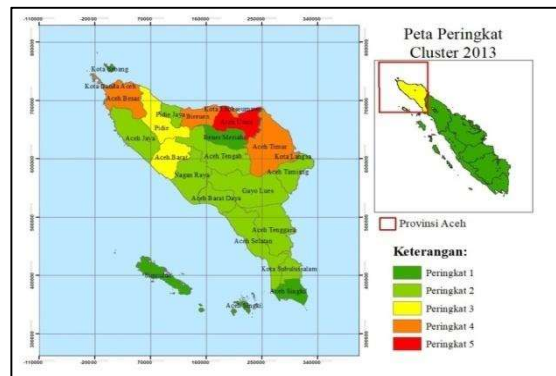
Hasil *cluster* untuk data kabupaten/kota di Provinsi Aceh berdasarkan jumlah kasus kekerasan, indeks pembangunan manusia dan persentase pengangguran pada tahun 2013 yaitu:

1. *Cluster* I yaitu Kabupaten Simeulue, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Sabang.
2. *Cluster* II yaitu Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh jaya dan Kabupaten Subussalam.
3. *Cluster* III yaitu Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Bireun, Kota Banda Aceh, Kota Langsa dan Kabupaten Lhokseumawe.
4. *Cluster* IV yaitu Kota Aceh barat dan Kabupaten Pidie.
5. *Cluster* V yaitu Aceh Utara.

Hasil *voting cluster* (kelompok) kabupaten kabupaten/kota di Provinsi Aceh tahun 2013 menghasilkan peringkat sebagai berikut:

1. Peringkat pertama adalah *cluster* I,
2. Peringkat kedua adalah *cluster* II,
3. Peringkat ketiga adalah *cluster* IV,
4. Peringkat keempat adalah *cluster* III ,
5. Peringkat kelima adalah *cluster* V.

Apapun visualisasi pengelompokan kabupaten/kota di Provinsi Aceh tahun 2013 yaitu sebagai berikut:

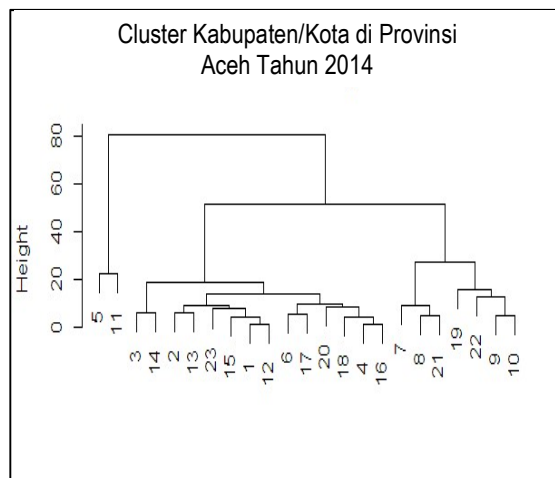


Sumber: diolah (2019)

Menampilkan bahwa Provinsi Aceh tahun 2013 dominan diduduki oleh *cluster* II yang menempati peringkat kedua yaitu Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Pidie Jaya dan Kota Subussalam dengan jumlah kasus kekerasan, persentase pengangguran yang sedikit lebih tinggi dari kabupaten/kota yang berada di peringkat pertama, sedangkan kabupaten/kota yang berada di peringkat kelima pada tahun 2013 tetap diduduki oleh Kabupaten Aceh Utara dengan persentase pengangguran yang tinggi dan jumlah kasus kekerasan yang lebih banyak terjadi pada tahun 2013 dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Aceh.

Pengelompokan, Pemingkatan dan Visualisasi Kabupaten/kota di Provinsi Aceh Tahun 2014

Pengelompokan kabupaten/kota di Provinsi Aceh tahun 2014 berdasarkan jumlah kasus kekerasan, persentase pengangguran dan IPM dengan metode *non-hirarki* adalah sebagai berikut:



Sumber: diolah (2019)

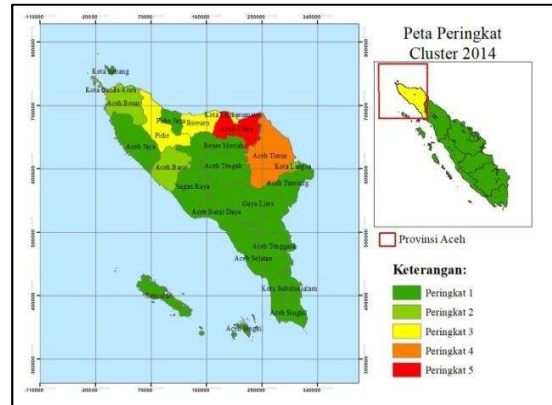
Hasil *cluster* untuk data kabupaten/kota di Provinsi Aceh berdasarkan jumlah kasus kekerasan, indeks pembangunan manusia dan persentase pengangguran pada tahun 2014 yaitu:

1. *Cluster* I yaitu Kabupaten Simeulue, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh tamiang, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Pidie Jaya, Kota Sabang dan Kota Subussalam.
2. *Cluster* II yaitu Kabupaten Aceh Timur.
3. *Cluster* III yaitu Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Besar dan Kota Langsa.
4. *Cluster* IV yaitu Kota Banda Aceh, Kabupaten Pidie, Kabupaten Bireun dan Kota Lhokseumawe.
5. *Cluster* V yaitu, Kabupaten Aceh Utara.

Hasil *voting* dengan menggunakan empat nilai statistik diatas menemukan bahwa 5 *cluster* kabupaten/kota di Provinsi Aceh tahun 2014 memiliki peringkat sebagai berikut:

1. Peringkat pertama adalah *cluster* I,
2. Peringkat kedua adalah *cluster* III,
3. Peringkat ketiga adalah *cluster* IV,
4. Peringkat keempat adalah *cluster* II,
5. Peringkat kelima adalah *cluster* V.

Perbedaan dari tiap cluster divisualisasikan dengan peta kabupaten/kota di Provinsi Aceh sebagai berikut:

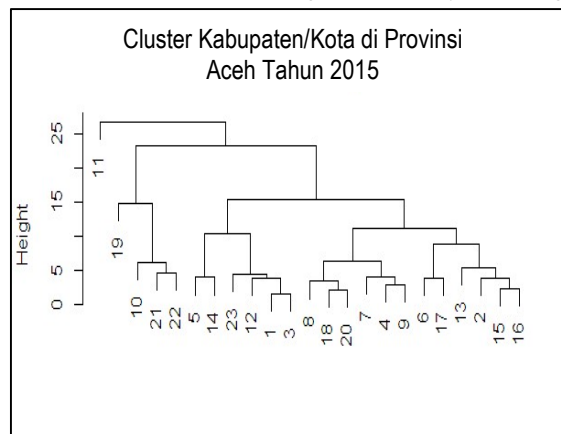


Sumber: diolah (2019)

Memperlihatkan bahwa kabupaten/kota di Provinsi Aceh tahun 2014 di dominasi oleh kelompok peringkat pertama berwarna hijau tua yang terdiri dari Kabupaten Simeulue, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Pidie Jaya, Kota Subussalam dan Kota Sabang. Daerah-daerah yang berada di peringkat pertama tahun 2014 bertambah sebanyak 10 kabupaten/kota dibandingkan tahun 2013 yang hanya diisi oleh 4 kabupaten/kota. Pada tahun 2014 daerah yang berada pada warna merah atau peringkat terakhir adalah Kabupaten Aceh Utara dengan persentase pengangguran dan jumlah kasus kekerasan yang tinggi dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Aceh.

Pengelompokkan, Pemingkatan dan Visualisasi Kabupaten/kota di Provinsi Aceh Tahun 2015

Metode *non-hirarki* digunakan untuk mengelompokkan kabupaten/kota di Provinsi Aceh Tahun 2015 berdasarkan jumlah kasus kekerasan, persentase pengangguran dan IPM. Adapun hasil pengelompokkan yaitu sebagai berikut:



Sumber: diolah (2019)

Hasil *cluster* untuk 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh berdasarkan jumlah kasus kekerasan, persentase pengangguran, dan indeks pembangunan manusia pada tahun 2015 yaitu:

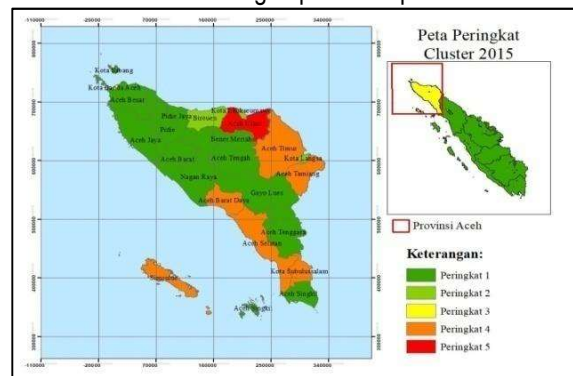
1. *Cluster* I yaitu Kabupaten Simeulue, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Tamiang dan Kota Subussalam.

2. *Cluster* II yaitu Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Pidie Jaya dan Kota Sabang.
3. *Cluster* III yaitu Bireun, Kota Langsa dan Kota Lhokseumawe.
4. *Cluster* IV yaitu Kabupaten Aceh Utara.
5. *Cluster* V yaitu Kota Banda Aceh.

Metode *voting* menggunakan empat nilai statistik seperti mean, median, minimum dan maksimum menunjukkan hasil peringkat *cluster* kabupaten/kota tahun 2015 yaitu:

1. Peringkat pertama adalah *cluster* II,
2. Peringkat kedua adalah *cluster* III,
3. Peringkat ketiga adalah *cluster* V,
4. Peringkat keempat adalah *cluster* I,
5. Peringkat kelima adalah *cluster* IV.

Kabupaten/kota yang telah dikelompokkan dalam 5 *cluster* berdasarkan jumlah kasus kekerasan, IPM dan persentase pengangguran tahun 2015. Kelima *cluster* diperingkatkan berdasarkan empat nilai statistik sehingga menemukan peringkat kesatu sampai kelima. Perbedaan dari tiap *cluster* divisualisasikan dengan peta kabupaten/kota di Provinsi Aceh sebagai berikut:



Sumber: diolah (2019)

Menunjukkan bahwa Provinsi Aceh tahun 2015 dominan diduduki kabupaten/kota oleh *cluster* II pada peringkat pertama dengan jumlah kasus kekerasan dan persentase pengangguran yang rendah serta IPM tinggi. Kabupaten/kota peringkat pertama ditandai dengan daerah-daerah berwarna hijau tua terdiri dari Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Jaya dan Kabupaten Bener Meriah. Pada tahun 2015 daerah dengan kasus kekerasan terbanyak dan persentase pengangguran tertinggi tetap berada di Kabupaten/kota pada *cluster* V yaitu Kabupaten Aceh Utara yang ditandai dengan warna merah pada peta.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pemeringkatan pada *cluster* kabupaten/kota di Provinsi Aceh pada tahun 2010-2015, didapatkan bahwa daerah pada peringkat pertama dengan jumlah kasus kekerasan dan persentase pengangguran yang rendah serta IPM yang tinggi tiap tahun mengalami perubahan. Adapun daerah yang bertahan diperingkat pertama dalam kurun waktu yang lama adalah Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Simeulue, Kota Sabang dan Kota Banda Aceh.

Melihat pergeseran wilayah melalui analisis visual terhadap *output cluster* untuk data 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh dalam kurun waktu 2010-2015. Kota Sabang menjadi daerah yang dianggap sukses dalam membangun kesejahteraan masyarakat karena berhasil merangkak maju dari peringkat *cluster* rendah hingga berada pada *cluster* peringkat tertinggi. Secara umum kabupaten/kota di Provinsi Aceh dalam rentang waktu 2010-2015 memiliki persentase pengangguran, jumlah kasus kekerasan dan indeks pembangunan manusia yang berada dalam rentang peringkat menengah. Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2010-2015 hanya ada satu daerah yang berada pada zona merah yaitu Kabupaten Aceh Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2017). Indeks Pembangunan Manusia kabupaten/ kota di Provinsi Aceh 2010-2015.
- Badan Pusat Statistik. (2018). Tingkat Pengangguran kabupaten/ kota di Provinsi Aceh 2010-2015.
- Beik, I. S. (2016). *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Chalid, N. & Yusuf, Y. (2014). Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Upah Minimum kabupaten/kota dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh. *Jurnal Ekonomi*. 22(2). 1-12.
- Dillon, W. R. & M. Goldstein. (1984). *Multivariate Analysis—Methods and Applications*. New York: Wiley
- Erlina. (2014). Analisa Kriminologi Terhadap Kekerasan Dalam Kejahatan. *Al-daulah*. 3(2). 217-228.
- Hufad, A. (2003). Perilaku Kekerasan: Analisis Menurut Sistem Budaya Dan Implikasi Eduktif. *Mimbar Pendidikan*. XXII(2). 52-61.
- Maisah. (2016). Rumah Tangga Dan HAM: Studi Atas Trend Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Provinsi Jambi. *Musawa*.15(1).445-457.
- Mirza, D., S. (2012). Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah Tahun 2006-2009. *Economics Development Analysis Journal*. 1(1). 1-15.
- Nurmainah, S. (2013). Analisis Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Daerah, Tenaga Kerja Terserap dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*. 20(2). 131-141.
- Nurcholis, M. (2014). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2014. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. 12(1). 45-57.
- Qardhawi, Y. (2005). *Spektrum Zakat*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan Indonesia (2019). Jumlah Kasus Kekerasan kabupaten/kota di Provinsi Aceh 2010-2015.
- Sabrina, A., A. (2018). Peran *United Nations High Commissioner for Refugee (UNHCR)* dalam Menangani Pengungsi Suriah Korban *Sexual and Gender-based Violence (SGBV)* di Lebanon. *Journal of International Relations*. 4(1). 81-89.